



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
KECAMATAN JONGKONG
(LKjIP)**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jongkong Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jongkong ini merupakan Laporan Tahunan yang akan melihat sejauh mana Kinerja Organisasi memberikan manfaat atas pekerjaan yang dilaksanakan pada Instansi Kecamatan Jongkong selama tahun 2024 serta menyajikan data capaian kinerja Kecamatan Jongkong tahun 2024 serta merupakan suatu Dokumen yang diformal dalam komponem dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan strategi. Penyusunan Rencana Kinerja tahun 2024 dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mampu mengidentifikasikan dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan Kualitas Kinerja dimasa mendatang. Disamping itu juga menyajikan penjelasan atas kegagalan, mengidentifikasikan peluang kegagalan serta menyajikan perubahan kebijakan untuk perbaikan ditahun mendatang.

Kami menyadari sepenunya bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini jauh dari standar Ideal sebagaimana digariskan, karena itu perlu kiranya masukan berupa kritikan dan saran yang Konstruktif dan Objektif dari semua pihak, demi kesempurnaan Penyusunan LKjIP tahun berikutnya.

Jongkong, Januari 2025



Ditanda tangani secara elektronik oleh :
CAMAT JONGKONG



YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev
PEMBINA IV/a

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, beerhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*Result Oreinted Govenmend*), sedangkan untuk mengetahui tingkat Akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga. Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Unit Kerja Mandiri yang mengelola Anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh Pimpinan Instansi masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya, sesuai dengan Siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2024 yang merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban Kinerja suatu Instansi dalam mencapai Tujuan/Sasaran Strategi Instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) berisi Ikhtisar Pencapaian Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dan Dokumen Perencanaan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah menyajikan pertanggung jawaban Kinerja Instansi Pemerintah (Kecamatan Jongkong) dalam mencapai sasaran strategis instansi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja diawali tahun anggaran. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini dapat digunakan sebagai:

- 1) Sumber Informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian Kinerja Kecamatan Jongkong dengan membandingkan hasil Pengukuran Kinerja dan Penetapan Kinerja;
- 2) Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Jongkong; dan
- 3) Bahan evaluasi untuk Penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Jongkong pada tahun berikutnya.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsinya Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.

Dalam penyelenggaran tugas pokok tersebut, Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksana tugas-tugas umum Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaran Ketertnrtaman dan ketertiban Umum;

- d. Mengkoordinasikan Penerapan dan peningkatan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan Sarana dan Prasarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Selain melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksudkan di atas, Camat melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas nya sebagai Pemimpin dan Koordinator Pemerintahan di wilayah Kecamatan, Camat Jongkong melaksanakan Fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Operasional Kecamatan;
- b. Pengelola Barang Milik/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

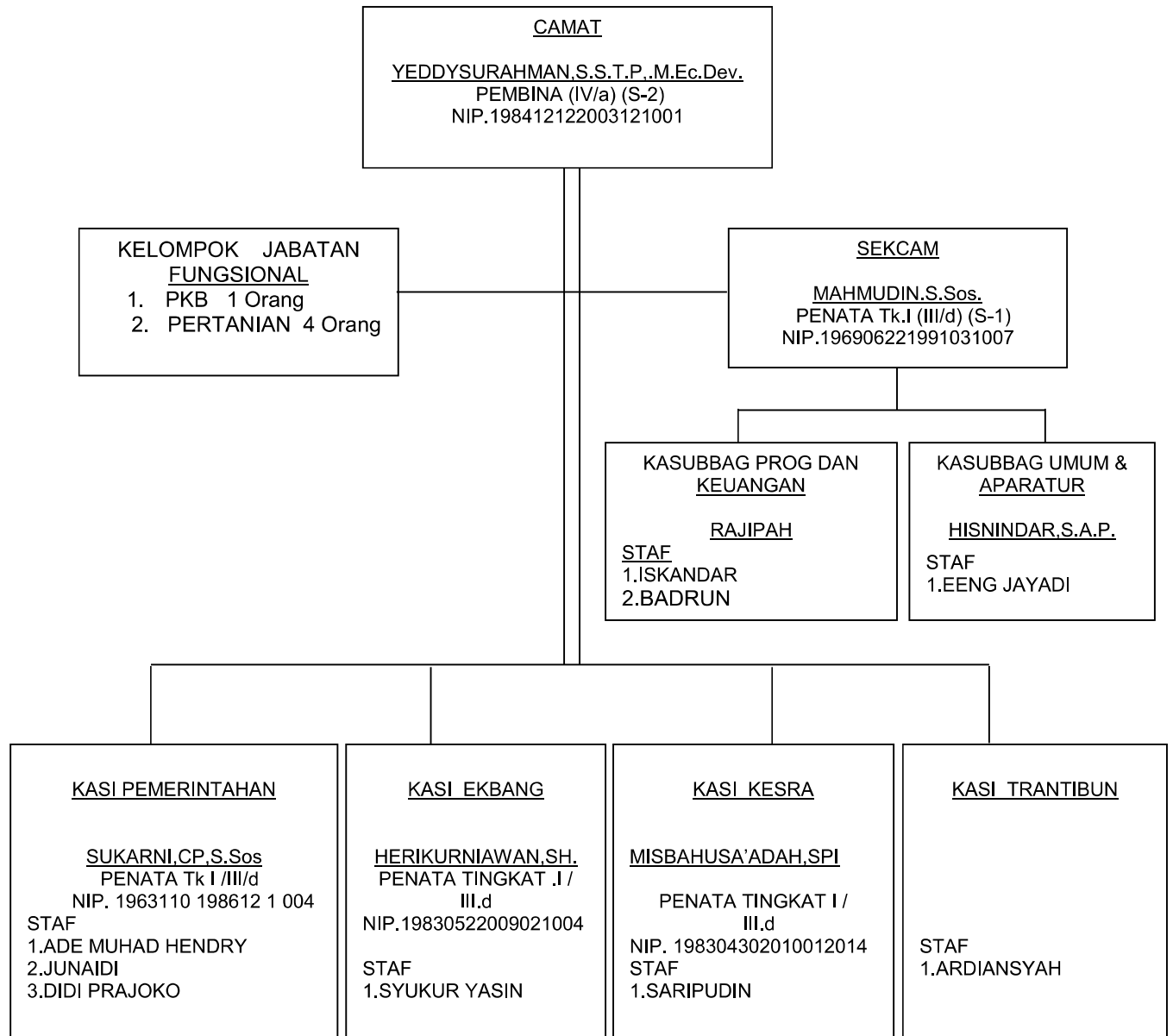
- c. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. Menyampaikan Laporan yang berkaitan dengan Bidang tugasnya secara periodik; dan
- e. Pelaksanaan Tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya.

Di dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, terdapat Bagan Struktur Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
Terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum dan Aparatur
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- f. Seksi Keterampilan dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Kecamatan Jongkong sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN JONGKONG



Sumber: Data Kec. Jongkong, 2024

1.3 Sumber Daya Aparatur (SDA)

Aspek Sumber Daya Aparatur yang ada di SKPD Kecamatan Jongkong secara Kualitas masih kurang belum adanya penambahan Tenaga Aparatur Negara (ASN), sehingga daya dukung belum kuat untuk tercapainya Tujuan Organisasi.

Kantor Kecamatan Jongkong dalam melaksanakan TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) didukung oleh 18 orang personil Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Strata (S-2) sebanyak 1 (satu) Orang, S1 sebanyak 5 (lima) D3 sebanyak 1 (satu) orang, SLTA sebanyak 11 (sebelas) orang, dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Daya Aparatur merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengelola faktor-faktor lainnya untuk mencapai Produktifitas Sumber Daya yang Optimal. Kantor Kecamatan Jongkong dalam melaksanakan roda pembangunannya didukung oleh Sumber Daya Aparatur sebagai berikut:

1. Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang terdiri dari:

- a) Golongan II = 6 orang
- b) Golongan III = 8 orang
- c) Golongan IV = 1 orang
- d) Golongan V = 0 orang

2. Dari segi Kualitas Pendidikan Formal, terdiri dari:

- a) S-2 = 1 orang
- b) S-1 = 5 orang
- c) D-3 = 1 orang
- d) SMA = 0 orang
- e) SMP dan SD = 0 orang

Perkembangan Pegawai Kecamatan Jongkong Mengikuti Diklat Struktural

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai SKPD Kecamatan Jongkong
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Sub Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1.	Camat	1							
2.	Sekcam		1						1
3.	Seksi Pemerihatatan		1			3			4
4.	Seksi Ekbang		1			1			2
5.	Seksi Kesra		1			1			2
6.	Seksi Trantif					1			2
7.	Kasubbag Umum dan Aparatur		1			2			3
8.	Subbag Program dan Keuangan					3			3
9.	Kelompok Jabatan Fungsional					1			1
10.	Pelaksana								
Jumlah		1	5			12			18

Sumber: Data diolah Kec. Jongkong, 2024

1.4 Sumber Daya Keuangan

Sarana penunjang lain dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran tujuan Anggaran Tahun 2024 adalah sumber Dana, karena tanpa adanya dukungan Dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap Kinerja Para Pegawai di Kantor Kecamatan

Jongkong dalam menjalankan tugas pokoknya Sumber Daya Keuangan berasal dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Tabel 1.2
Ringkasan Anggaran Kecamatan Jongkong

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Operasional			
	Belanja Pegawai	1.450.854.912	1.600.673.000	149.818.088
	Belanja Barang dan Jasa	517.583.156	532.083.156	14.500.000
	Belanja Hibah	31.500.000	31.500.000	0
	J u m l a h	1.999.938.068	2.164.256.156	164.318.088

Sumber: Data Kec. Jongkong, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Jongkong pada perubahan anggaran tahun 2024 mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp164.318.088,00 sehingga tahun 2024 Kecamatan Jongkong memperoleh anggaran sebesar Rp2.164.256.156,00. Berikut ini rincian DPPA-SKP Kantor Kecamatan Jongkong Tahun 2024, Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jongkong:

Tabel 1.3
Rencana Kerja dan Pendanaan
Kecamatan Jongkong Tahun 2024

No.	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan tepat waktu	3.000.000	100 %
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.602.481.500	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.523.273.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai	77.400.000	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan akhrit Tahun	1.808.500	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		33.064.000	100%
3.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Meningkat nya Disiplin ASN	28.064.000	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang Undangan	Meningkatnya Kafasitas ASN	5.000.000	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		245.705.500	100 %
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Barang Perlengkapan Kantor	22.797.500.	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5.573.000	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan	161.677.000	100 %

No.	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Konsultasi SKPD		
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		236.162.156	
	Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik	Tersediannya dana untuk Keperluan sumber daya air dan Listrik	10.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	225.362.156	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36.293.000	100%
	Pemeliharaan Jasa Meemlihara, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Janbatan	Jumlah Pemeliharaan, Jasa Memelihara Biaya Pemeliharaan Pajak Kendraan Perorang Dinas Perorang atau Kendraan dinas Jabatan	36.293.000	100 %
7.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		7.550.000	100 %
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	7.550.000	100%

Sumber: Data Kec. Jongkong, 2024

1.5 Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran dalam melaksanakan Kegiatan di Kecamatan Jongkong pada tahun 2024. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Jongkong dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4
Kondisi Bangunan Gedung dan Ruang
Kantor Kecamatan Jongkong Tahun 2024

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Ruang kantor	1 Unit	Baik	
1.	Ruang Camat	1 Ruang	Baik	
2.	Ruang Sekcam	1 Ruang	Baik	
3.	Ruang Kasi Pemerintahan	1 Ruang	Baik	
4.	Ruang Kasi Trantib	1 Ruang	Baik	
5.	Ruang Kasi Kesra	1 Ruang	Baik	
6.	Ruang Kasi Ekbang	1 Ruang	Baik	
7.	Ruang Kasubag umpar	1 Ruang	Baik	
8.	Ruang Program dan Keuangan	1 Ruang	Baik	
9.	Ruang Operator E-KTP	1 Ruang	Baik	
10.	Ruang Operator Siak	1 Ruang	Baik	
11.	Ruang Telkom	1 Ruang	Baik	

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	Dapur	1 Ruang	Baik	
13.	Gudang	1 Ruang	Baik	
14.	Ruang Tamu	1 Ruang	Baik	
15.	Ruang Rapat	1 Ruang	Baik	
16.	WC/Toilet	1 Ruang	Baik	
II.	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik	
III.	Renopasi Ruang KTP	1 Unit	Baik	
IV.	Ruang Server	1 Ruang	Baik	
V.	Ruang Genset	1 Ruang	Baik	
VI.	Instalasi Listrik	2 Ruang	Baik	

Sumber: Data Kec. Jongkong, 2024

Berdasarkan tabel di atas, sarana dan prasarana bangunan atau 21 ruangan dalam kondisi baik, secara rinci data sarana dan prasaranan kecamatan Jongkong sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana
Kecamatan Jongkong Tahun 2024

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak	
1.	Kendaraan Roda Dua	9	8	1	Rusak
2.	Komputer	4	-	4	
3.	Laptop	12	10	2	
4.	TV	2	1	1	
5.	AC	2		2	Rusak
6.	Mesin Tik				
7.	Mesin Pemotong Rumput	2	1	1	
8.	Printer	10	10		
9.	PC Unit	3	3		
10.	Genset	3	1	2	
11.	Meja Kerja	16	16		
12.	Meja Tamu	3	3		
13.	Tempat tidur	2	2		Rusak
14.	Kursi kerja	16	16	-	
15.	Kursi rapat	200	150	50	
16.	Meja Komputer	4	-	4	
17.	Kursi Tamu	2 set	2 set	-	
18.	Lemari Arsip	7	6	1	Rusak

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak	
19.	Papan Data	4	4		
20.	Proyektor / Infokus	1 Unit	1	-	
21.	SSB	1 Unit	1	-	
22.	Parabola	1 Unit	1	-	
23.	Wireless	2	2	-	

Sumber: Data Kec. Jongkong, 2024

1.6 ISUE STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang Kecamatan Jongkong dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani sebagai berikut:

1. Prasarana dan Sarana Transportasi Antar Desa/Kelurahan di Kecamatan Jongkong masih terdapat jenis permukaan jalan masih diperkeras (kerikil Batu) Jongkong Kanan dan Kandung Suli.
2. Koperasi Aktif Menurut dan Jenis Koperasi di Kecamatan Jongkong hanya terdapat satu koperasi Jenis Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra).
3. Sarana Perdagangan dan Jenis Sarana Perdagangan di Kecamatan Jongkong hanya terdapat di satu desa yaitu di Desa Jongkong Pasar.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Perencanaan Kinerja terdapat keterkaitan antara rencana strategis Kecamatan Jongkong dengan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD tersebut sebagai acuan. Artinya indikator kinerja Kecamatan Jongkong harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai kewenangan Kecamatan Jongkong yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Kecamatan Jongkong. Dari ketiga misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih maka Kecamatan Jongkong ikut berkontribusi dalam misi ke 4 (empat) yaitu: **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa Dan Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Berbasis Transparan, Responsibilitas, dan Akuntabilitas”**.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Jongkong

A. Tujuan dan Sasaran

Penetapan terhadap program Pembangunan Daerah pada dasarnya untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu secara universal. Disisi lain, penetapan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian operasional dan terkait dengan visi-misi serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu selama periode pelaksanaan pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang aman, religious, dan berbudaya.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan jumlah Desa mandiri.

4. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.
8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah.
9. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Dari tujuan pembangunan sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu di atas maka Kecamatan Jongkong sesuai dengan tupoksinya memiliki andil pada tujuan ke 7 (tujuh) yaitu: “Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”.

Dengan mempertimbangkan kewenangan yang ada pada Kecamatan Jongkong maka dirumuskanlah sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU). Dari kewenangan yang ada dan memperhatikan program/kegiatan yang mampu dibiayai berdasarkan pagu anggaran dimasa yang lalu, maka kinerja pelayanan

Kecamatan Jongkong diwujudkan pada sasaran strategis dan Kinerja pelayanan Kecamatan Jongkong adalah mewujudkan, sasaran strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Kantor Kecamatan Jongkong Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi biokrasi.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Jongkong	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD. 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per Undang-Undangan.
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pemerintah Daerah	Listrik. 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah	1. Pemeliharaan Jasa Memelihara Biaya Pemeliharaan Pajak Dinas Jabatan.
2.		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	1. Penigkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

Sumber: Data diolah Kec. Jongkong, 2024

B. Strategis dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan adalah dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada, dimana untuk menunjang keberhasilan Visi dan Misi harus melaksanakan suatu kegiatan yang nyata, sistematis, dan terpadu. Sesuai dengan Renstra Kecamatan Jongkong, diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun Hierarki Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (RENSTRA) kecamatan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu.
2. RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu mengacu memperhatikan RPJM Nasional dan Daerah Provinsi.
3. Rencana Strategis (RENSTRA) kecamatan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tiap tahun.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jongkong Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026, Visi, Misi, dan program Bupati Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan, serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu RENSTRA disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Penyusunan RENSTRA dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan RENSTRA Kecamatan Jongkong.

Ilustrasi keterhubungan RENSTRA SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat dilihat pada halaman selanjutnya.

Gambar 2.1
Gambar Keterhubungan Resntra, RPJMD, dan Renja SKPD



Sumber: Data Kecamatan Jongkong, 2024

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Dimana Rencana Strategis mengandung VISI, MISI, Tujuan dan Strategis Kebijakan dengan memformulasikan dengan jelas dan memanfaatkan Sumber Daya yang ada. Dimana untuk menunjang keberhasilan Visi dan Misi harus melaksanakan suatu kegiatan yang nyata, Sistematis, dan Terpadu, sesuai dengan Renstra Kecamatan Jongkong, ada beberapa Indikator Kinerja Utama yang merupakan Strategis dan Kebijakan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
2. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah Penetapan Kinerja (TAPKIN) Kecamatan Jongkong Tahun 2024, yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024. Perjanjian Kinerja meliputi 2 (dua) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Jongkong.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, maka Perjanjian Kinerja Kecamatan Jongkong Tahun 2024 mengacu pada dokumen indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja serta Rencana Aksi.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kantor Kecamatan Jongkong Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Jongkong	1	Predikat SAKIP	Indeks	B
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Jongkong	2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Predikat	82

Sumber: Data diolah Kec. Jongkong, 2024

Untuk mencapai/mewujudkan Target Kinerja yang ditetapkan, Kantor Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Anggaran Belanja sebesar Rp1.999.938.068,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah), yang berasal dari Dana Transfer Dana Alokasi Umum Kabupaten Kapuas Hulu, yang selengkapnya sebagaimana dalam DPA Kecamatan Tahun Anggaran 2024.

Setelah Dokumen Anggaran Perubahan Anggaran (DPPA) berubah menjadi Rp2.164.256.156,00 (dua milyar seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah). Perubahan ini terjadi karena adanya Pengeseran Anggaran Pada Kantor Kecamatan Jongkong Tahun anggaran 2024.

Tabel 2.3
Anggaran Kantor Kecamatan Jongkong tahun 2024

No.	Anggaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Persentase% Bertambah /Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Operasional	1.999.938.068,-	2.164.256.156,-	7.59
2.	Belanja Pegawai	1.450.854.912,-	1.600.673.000,-	9.36
3.	Belanja Barang dan Jasa	517.583.156,-	532.083.156,-	2.73
4.	Belanja Hibah	31.500.000,-	31.500.000,-	0.00

Sumber: Data diolah Kec. Jongkong, 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Jongkong merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Jongkong Tahun 2024. tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

a. Metode Pengukuran Kinerja

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Jongkong dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Jongkong Tahun 2024:

1. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
2. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran 2024. Kecamatan Jongkong telah melaksanakan berbagai strategi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Nilai Capaian Kinerjanya dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut:

- a) 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- b) $70 \leq X < 85$: Berhasil
- c) $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
- d) < 55 : Tidak Berhasil

Capaian kinerja Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2024 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan Evaluasi Capaian dan Akuntabilitas Kinerja meliputi Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, Analisis penggunaan Sumber Daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Target Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Jongkong tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
Kecamatan Jongkong

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Jongkong	Predikat SAKIP	Surveis	B	CC	59,35%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Jongkong	Nilai SKM	Predikat	87	81,33	93,48%

Sumber: Data diolah Kec. Jongkong, 2024

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi, Kinerja Kantor Kecamatan Jongkong pada beberapa tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN			
				SB	B	CB	CT
1.	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Jongkong	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor	Predikat SAKIP			v	
2.	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Jongkong	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SKM	v			

Sumber: Data diolah Kec. Jongkong, 2024

Berdasarkan data yang disajikan pada table di atas, dari 2 (dua) pencapaian Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Jongkong sebagaimana table di atas Sangat Berhasil 1 sasaran dan Cukup Berhasil 1 sasaran. Dari 2 Sasaran dan 2 Indikator Kinerja, Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kantor Kecamatan Jongkong Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Persentase kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sasaran I		
	Sangat Berhasil	-	-
	Berhasil	-	-
	Cukup Berhasil	1	100 %

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tidak Berhasil	-	-
2.	Sasaran 2		
	Sangat Berhasil	1	100 %
	Berhasil	-	-
	Cukup Berhasil	-	-
	Tidak Berhasil	-	-

Sumber: Data diolah Kec. Jongkong, 2024

Sasaran 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Jongkong Kantor Kecamatan Jongkong.

Adapun maksud dari Sasaran tersebut adalah untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran serta Peningkatan Kinerja Instansi Pelayanan Kecamatan Jongkong.

Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator nilai (sekor) Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Adapun nilai/sekornya berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah rangkaian sistem dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktirasan, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah kegiatan yang meliputi:

- a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, kegiatan meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Kinerja Sasaran “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Jongkong”. Dapat dilihat dari Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4
Meningkatnya Akuntabilitas Kenerja
Kantor Kecamatan Jongkong Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Predikat SAKIP	Predikat	B	CC	59,35%
	Capaian Sasaran Cukup Berhasil (59,35%)				

Sumber: Laporan SAKIP Kec. Jongkong, 2023

2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang kegiatannya meliputi:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah meliputi:
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang meliputi:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Kinerja Sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Jongkong” dapat di lihat dari Capaian Indikator sebagai berikut:

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang meliputi:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor.
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Jasa Memelihara, Biaya pemeliharaan Pajak Dinas Jabatan.
 - Pemeliharaan Mesin Lainnya.

3. Program Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

Kegiatannya meliputi:

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan,

Tabel 3.5
Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)	Nilai	87	81,33	93,48%
Capaian Sasaran Sangat Berhasil (93,48%)					

Sumber: Laporan SKM Kec. Jongkong, 2023

Sasaran 2 : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Target Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Aparatur Tahun 2024, dengan target sebesar 87 dengan Realisasi 81,33, dengan Capaian Kinerja 93,84%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, dengan target 80 Realisasi 80, maka terjadi Peningkatan Kinerja sebesar 1,15%. Penyelenggaraan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), adalah Rangkaian Sistematis dari berbagai aktifitas, Alat dan Prosedur yang dirancang untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Instansi Pemerintah Daerah.

Tabel 3.6
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kantor
Kecamatan Jongkong Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Predikat SAKIP	B	C	100	B	CC	100	B	B	100

Sumber: Data diolah Kec. Jongkong, 2024

Penyelenggaraan SAKIP Kecamatan Tahun 2024 berdasarkan Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu belum diketahui capaiannya yaitu pada Indikator Predikat SAKIP Kantor Kecamatan Jongkong, hal ini dikarenakan masih belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat sumber daya yang mendukung seluruh pegawai dan pimpinan di lingkungan Kantor Kecamatan

Jongkong atas tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi pada setiap unit kerja untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2023 Predikat SAKIP Kantor Kecamatan Jongkong Mendapat Nilai CC, artinya bahwa pencapaian Indikator Kinerja Predikat SAKIP Kecamatan Jongkong ada peningkatan dari “C” menjadi “CC”. Pencapaian Kinerja Nilai (Skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Jongkong dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 sudah dilakukan penilaian dari Tim Evaluasi Penyelenggara SAKIP Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisai	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	SKM	80	80	100	87	81,33	93,48	85	85	100

Sumber: Data diolah Kec. Jongkong, 2024

Pencapaian Nilai/Skor Akuntabilitas Pemerintah Daerah Tahun 2024, jika dibandingkan dengan target akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Dibandingkan Dengan Pencapaian Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

No.	Indikator Kinerja	Target Akhir Tahun RPJMD	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Predikat SAKIP	B	CC	70%

2.	SKM	87	82	85 %
Capaian Sasaran Berhasil (89%)				

Sumber: Data diolah Kec. Jongkong, 2024

Tingkat keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator Nilai/Skor Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang lebih dan Profesional dengan wujudkan target Indikator yang berorientasi Hasil. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan Pencapaian Indikator Nilai (Skor). Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 melakukan perubahan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2017;
2. Pelaksanaan Review Indikator Kinerja Utama dengan Penetapan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2017;
3. Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sampai dengan Pejabat Pengawas;
4. Penyusunan Rencana Aksi atas Kinerja; dan
5. Pelaksanaan Pengumpulan Data Kinerja dilaksanakan per Tri wulan;

Pencapaian nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah tentunya tidak dapat tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan disebabkan oleh beberapa kendala-kendala dalam yang dihadapi. Adapun beberapa kendala tersebut antara lain:

1. Masih Rendahnya Kualitas Perencanaan strategis;

2. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah belum berorientasi hasil;
3. Indikator Kinerja Sasaran OPD belum selaras dengan IKU RPJMD;
4. Pengukuran Kinerja baru dilaksanakan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
5. Masih kurangnya ketercukupan Informasi Kinerja sebagai dasar Penyusunan Pelaporan Kinerja serta tindaklanjut permasalahan yang dilaporkan;
6. Masih banyak terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak berorientasi kepada Pencapaian Sasaran Strategis; dan
7. Masih lemahnya pemenuhan data dan dokumen Perencanaan Strategis dan Proses Penganggaran.

Untuk mengatasi beberapa kendala atau permasalahan dan sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, maka Pemerintah Kecamatan Jongkong mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi kendala atau permasalahan di atas, adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Jongkong adalah dengan:

1. Melaksanakan Review kembali terhadap dokumen-dokumen Perencanaan Strategis.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pemenuhan data dan dokumen perencanaan strategis yang telah dibuat.
3. Menyelaraskan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja OPD, dengan melakukan komunikasi intens kepada OPD terkait yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

4. Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka penyamaan persepsi, pemahaman tujuan, manfaat, dan mekanisme pengukuran kinerja dengan berpedoman pada IKU dan IKI yang telah dibuat.
5. Melaksanakan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam Sistem Penganggaran.
6. Melaksanakan Riview dan pembaharuan sasaran startegis secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan yang dinamis.
7. Mengoptimalkan monitoring dalam pengumpulan data/dokumen Kinerja maupun keuangan yang dilakukan per Triwulan.

Target kinerja persentase terhadap penyelesaian Temuan Inspektorat yang sudah ditidaklanjuti hal ini merupakan proses meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan. Adapun capaian kinerjanya dalam penyelesaian temuan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebesar 100%.

Dilihat dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Publik kepada masyarakat yang terdiri dari:

1. Indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikatagorikan Berhasil;
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Startegis Organisasi;
4. Realisasi Anggaran pada tahun 2024 ada 2 sasaran program strategis, sementara Indikator Kinerjanya ada mengalami beberapa perubahan/penambahan dari tahun sebelumnya, begitu juga dengan

Indikatornya karena disesuaikan dengan Kebutuhan pada tahun yang bersangkutan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan:

1. Melakukan Pembinaan, didukung dengan:

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Kantor Kecamatan Jongkong telah berusaha secara efisien dan efektif dalam optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Aparatur maupun Sumber Daya Dana yang ada untuk menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Dalam usaha untuk mencapai keberhasilan ada juga kendala/kegagalan tidak seperti yang diharapkan, antara lain dalam memperdayakan personil karena kurang sumber daya Manusia (SDM), namun Pemerintah Kecamatan Jongkong telah mengantisipasi dengan optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi setiap per triwulan untuk memastikan program/kegiatan berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang sudah ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja organisasi sebagaimana di tuangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka diperlukan ketersediaan anggaran sebagai salah satu faktor pendukung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Jongkong, adapun

realisasi anggaran tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai mana tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kantor Kecamatan Jongkong Tahun 2024

No.	Anggaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belanja Operasional	1.999.938.068,-	2.164.256.156,-	7.59 %
2	Belanja Barang Pegawai	1.450.854.912,-	1.600.673.000.-	9.36 %
3.	Belanja Barang dan Jasa	517.583.156,-,-	532.083.156,-,-	2.73 %
4	Belanja Hibah	31.500.000,-	31.500.000,-	0.00%

Sumber: DPA Kec. Jongkong, 2024

Tabel 3.10
Rincian DPPA Kantor Kecamatan Jongkong Tahun 2024

No.	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.000.000	100 %
	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Penyusunan RKA SKPD	3.000.000	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.602.481.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.523.273.000	%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian verifikasi	Meningkatkan Kesejahteraan	77.400.000	100 %

No.	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Keuangan SKPD	Pegawai		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan akhir Tahun	1.808.500	100 %
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		33.064.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Disiplin ASN	28.064.000	100 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Meningkatnya Kinerja ASN	5.000.000	100 %
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		245.705.500	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat perlengkapan Kantor	22.797.500	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5.753.000	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.155.000	100 %
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		236.162.156	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Peralatan penerangan Perkantoran	10.800.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Jasa Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	225.362.156	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		36.293.000	100 %
	Pemeliharaan jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Pemeliharaan jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.293.000	
7.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		7.550.000	100 %
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	7.550.000	100 %

No.	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kecamatan		

Sumber: DPA Kec. Jongkong, 2024

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi
Anggaran Kantor Kecamatan Jongkong
Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			T	R	C	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100	100	3.000.000	3.000.000	100%	
2.	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN	100	100	100	1.523.273.000	1.482.109.392	97,30%	
		2 Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian dan/verifikasi Keuangan SKPD	100	100	100	77.400.000	77.400.000	100%	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	100	100	100	1.808.500	1.808.500	100%	
3.	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	100	100	28.064.000	28.064.000	100%	
		2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	100	100	100	5.000.000	5.000.000	100%	
4.	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	100	100	100	22.797.500	22.797.500	100%	
		2 Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	100	100	100	5.753.000	5.753.000	100%	
		3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100	217.155.000	217.155.000	100%	

5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	100	100	100	10.800.000	10.775.200	99,77%	
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	100	225.362.156	225.362.156	100%	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Memeliharaaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	100	100	100	36.293.000	36.293.000	100%	
7.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100	100	100	7.550.000	7.550.000	100%	

Sumber: Data diolah Kec. Jongkong, 2024

Berdasarkan tabel di atas, penyerapan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

a. Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000, realisasi sebesar Rp3.000.000 atau 100%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan sebesar Rp1.523.273.000 terealisasi sebesar Rp1.482.109.392 atau 97,30% yang di peruntukan 14 Orang ASN dan 1 Orang tenaga PPPK.
4. Pelaksana Penatausahaan dan pengujian/verifikasin keuangan SKPD yang dianggarkan sebesar Rp77.400.000, terealisasi Rp77.400.000 atau 100%. Untuk tim verifikasi

SKPD terdiri dari Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Teknis Penatausahaan Keuangan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, dan Bendahara Barang.

5. Koordinasi dan penyusunan Laporan akhir Tahun yang dianggarkan sebesar Rp1.808.500 terealisasi Rp1.808.500 atau 100%, yang diperuntukan Koordinasi dan Konsultasi serta biaya Alat Tulis Kantor (ATK).

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang dianggarkan sebesar Rp28.064.000 terealisasi sebesar Rp28.064.000 atau 100%, yang diperuntukan untuk 14 orang ASN dan 1 Orang Tenaga PPPK serta 3 Orang Tenaga Kontrak Daerah.
2. Bimbingan Teknis implementasi peraturan per undang undangan yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000, terealisasi Rp5.000.000 atau 100%. Untuk biaya 1 (satu) Orang yang mengikuti kegiatan Bimtek. Dengan keterbatasan dana, maka dalam 1 (satu) Tahun hanya 1 (satu) orang ASN yang dapat ikut Pelatihan keluar Daerah.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah:

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di anggarkan sebesar Rp22.797.500, terealisasi sebesar Rp22.797.500 atau 100%. Untuk biaya alat peralatan dan perlengkapan Kantor Kecamatan Jongkong dalam 1 (satu) Tahun.
2. Peneyediaan Peralatan Rumah Tangga yang dianggarkan sebesar Rp.5.753.000, terealisasi sebesar Rp5.753.000 atau 100%. Untuk biaya pembelian atas isi ulang tabung gas Kantor Kecamatan Jongkong dalam 1 (satu) Tahun.

3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dianggarkan sebesar Rp217.155.000 terealisasi sebesar Rp217.155.000 atau 100 %. Untuk biaya Konsultasi dan Koordinasi ke Kabupaten dan Desa semua staf Kantor Camat Jongkong, dalam kegiatan ini selama satu tahun. Dana tersebut di peruntukan untuk 18 orang staf Kecamatan Jongkong tahun 2024.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik yang dianggarkan sebesar Rp10.800.000, terealisasi sebesar Rp10.775.200 atau 99,77%. Untuk bayaran Rekening Listrik Kantor Kecamatan dan Rumah Dinas Camat, Rekening Air Kantor Kecamatan dan Rekening air Rumah Dinas Camat.
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dianggarkan sebesar Rp225.362.156, terealisasi sebesar Rp225.362.156 atau 100%, untuk kegiatan pelayanan umum Kantor Kecamatan Jongkong selama 1 (satu) Tahun.
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Belanja bahan Bahan Bakar dan Pelumas yang di anggarkan sebesar Rp21.125.000 terealisasi sebesar Rp21.125.000 atau 100%, dan Speed Boat 2 buah 40 HP alat Inventaris Kantor Kecamatan Jongkong.
 2. Belanja Suku Cadang suku cadang alat angkutan yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000, terealisasi sebesar Rp1.000.000 atau 100%.
 3. Pemeliharaan Mesin Lainnya yang dianggarkan sebesar Rp14.168.000 terealisasi sebesar Rp14.168.000 atau 100%.

Untuk Pemeliharaan peralatan dan mesin pada Kantor Kecamatan Jongkong.

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dianggarkan sebesar Rp7.550.000, terealisasi sebesar Rp7.550.000 atau 100%, yang diperuntukan untuk Belanja alat/bahan untuk Kegiatan Kantor belajar Cetak dan Belanja Makan dan Minum Rapat Musrenbang dalam Tahun Anggaran 2024 yang diikuti semua Kades dan semua Dinas Instansi yang ada di Kecamatan Jongkong.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Jongkong tahun 2024 yang terdiri dari 2 sasaran strategis yang mencakup 2 indikator sasaran, sebagai berikut:

- Tujuan 1 terdapat 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja sasaran:
 - Capaian sasaran strategis 1, dengan Indikator Predikat SAKIP Tahun 2023 terakhir mencapai target **“CC” (>50 – 60) atau Cukup Berhasil.**
 - Capaian sasaran strategis 2, dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Tahun 2023 **memperoleh nilai 93,48 atau katagori Sangat Baik.**

Berkaitan dengan capaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran strategis yang mencakup 2 indikator sasaran, diketahui Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai **70%.**

Sedangkan realisasi anggaran Tahun 2024 berdasarkan 2 (dua) program yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, Kecamatan Jongkong menunjukan hasil pencapaian kegiatan Sangat Baik dengan capaian kinerja rata-rata **97,92%**, walaupun masih terdapat program dan beberapa kegiatan yang secara realisasi keuangan cukup maksimal. Secara keseluruhan sasaran kinerja yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dapat dicapai dengan baik.

B. Rekomendasi

Beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi perhatian Kantor Kecamatan Jongkong, antara lain:

1. Keterbatasan kewenangan yang dilimpahkan dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelembagaan kemasyarakatan.
2. Keterbatasan ketersediaan anggaran Kantor Kecamatan Jongkong yang berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan.
3. Belum memadainya daya dukung infrasturktur, sarana, dan prasarana pelayanan publik di Kantor Kecamatan Jongkong.

Adapun beberapa upaya maupun langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk meminimalisir kendala/permasalahan tersebut, antara lain:

1. Memaksimalkan koordinasi lintas sektor pelayanan publik yang ada di kecamatan Jongkong untuk penyelerasan dan penyamaan program kerja untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Desa yang ada di kecamatan Jongkong untuk menganggarkan belanja pembinaan kepada lembaga masyarakat di dalam SISKUEDES masing-masing desa dan juga penyediaan alternatif bantuan melalui *stakeholder* eksternal dalam rangka optimalisasi pembinaan kemasyarakatan.
3. Melakukan koordinasi dan pengajuan usulan penambahan anggaran melalui TAPD Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung pelayanan Kecamatan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dalam rencana anggaran tiap tahunnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Jongkong Tahun 2024, dengan ini dapat diperoleh gambaran tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu. Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Pemerintah ke arah yang lebih baik.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Jongkong Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dapat tercapai dengan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan itu semua akan menjadi perbaikan dan motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di tahun mendatang.

Jongkong, Januari 2025



Ditanda tangani secara elektronik oleh :

CAMAT JONGKONG



YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev
PEMBINA IV/a

LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
KANTOR KECAMATAN JONGKONG
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA SKPD / OPD: KECAMATAN JONGKONG

KODE			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
			Belanja Langsung	2.164.256.156	2.119.283.593	97,92%
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
7	01	01	2.01 1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	2.500.000	83,33%
7	01	01	2.01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000	2.500.000	83,33%
7	01	01	2.02 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.602.481.500	1.561.317.892	97,43%
7	01	01	2.02 a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.523.273.000	1.482.109.392	
7	01	01	2.02 b. Penyediaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.400.000	77.400.000	100%
7	01	01	2.02 c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1.808.500	1.808.500	100%
7	01	01	2.05 3. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	33.064.000	33.060.000	99,98%
7	01	01	2.05 a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28.064.000	28.060.000	99,98

KODE					PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
7	01	01	2.05	0011	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	100%
7	01	01	2.06		4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.705.500	245.646.730	99,76%
7	01	01	2.06	002	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.797.500	22.797.500	100%
7	01	01	2.06	003	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.753.000	5.753.000	100%
7	01	01	2.06	009	c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.155.000	217.096.230	99,97 %
7	01	01	2.08		5. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	236.162.156	233.097.971	98,70%
7	01	01	2.08	002	a. Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	10.775.200	99,77%
					▪ Tagihan Air	3.600.000	3.575.249	99,31%
					▪ Tagihan Listrik	7.200.000	7.199.951	99,99%
7	01	01	2.08	004	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.362.156	222.322.771	98,65%
					▪ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	20.394.000	19.822.626	97,19%
					▪ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	3.100.000	2.383.000	76,87%
					▪ Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	10.080.000	9.330.915	86,39%

KODE			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> Belanja Makan dan Minum Rapat 	30.000.000	28.999.250	96,66%
			<ul style="list-style-type: none"> Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu-Tamu 	14.600.000	14.600.000	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan 	3.200.000	3.200.000	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Belanja Jasa Tenaga Administrasi 	29.400.000	29.400.000	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 	19.800.000	19.800.000	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 	29.400.000	29.400.000	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Belanja Jasa Tenaga Keamanan 	29.400.000	29.400.000	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN 	3.954.276	3.953.100	99,97%
			<ul style="list-style-type: none"> Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN 	237.276	237.276	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja Bagi Non ASN 	296.604	296.604	100%
			<ul style="list-style-type: none"> Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 	31.500.000	31.500.000	100%
7	01	01	2.09	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.293.000	100%
7	01	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	36.293.000	100%

KODE			PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
			Kendaraan Dinas Jabatan			
			a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.125.000	21.125.000	100%
			b. Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	1000.000	1000.000	100%
			c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Alat Angkutan Apung Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	14.168.000	14.168.000	100%
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.550.000	7.550.000	100%
7	01	03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	7.550.000	7.550.000	100%
7	01	03	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	7.550.000	7.550.000	100%

Jongkong, Januari 2025

Ditanda tangani secara elektronik oleh :

CAMAT JONGKONG



YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P.,M.Ec.Dev
PEMBINA IV/a